

1st article:

UE Kurangi Konsumsi Energi 20%

Penduduk Eropa dipaksa menghemat energi mereka seiring keputusan para pemimpin Uni Eropa (UE) untuk mengurangi penggunaan energi nasional hingga 20%.

Para pemimpin 27 negara UE akhirnya menyepakati target 20-20 di Brussel, Belgia; yang berarti pada tahun 2020 UE akan mengurangi emisi karbon mereka sekutarnya 20% dibawah level 1990. Eropa juga akan menambah investasi teknologi terbarukan hingga 20% dari penggunaan energi saat ini, dan akan mengurangi penggunaan energi masing-masing Negara hingga 20%.

"Para pemimpin Eropa telah memberikan lampu hijau bagi serangkaian tolak ukur yang akan menempatkan Eropa menuju ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan,"kata Presiden UE Jose Manuel Barosso. Bersamaan dengan paket ini UE juga memantapkan diri berkomitmen atas reduksi emisi karbon di konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) di Kopenhagen, Denmark tahun depan.

Bagi negara-negara berkembang, komitmen UE ini berarti kabar baik. Sejak pertemuan UNFCCC di Bali tahun lalu dan akhir tahun ini di Poznan, Polandia; negara-negara berkembang yang tergabung dalam G77+China selalu mendesak negara-negara industri bertanggungjawab mengurangi emisi karbon mereka. Kelompok negara maju yang tergabung dalam Annex I ini dituding bertanggungjawab menyebabkan perubahan iklim yang kini terjadi, terkait lonjakan karbon dioksida ke udara sejak revolusi industri di abad 19.

Sekretaris Jenderal UNFCCC Yvo de Boer segera menyambut baik keputusan UE ini. "Kesepakatan Uni Eropa memberikan pesan jelas batu penghalang negosiasi di Poznan menuju Kopenhagen semakin terangkat dan terselesaikan,"katanya. De Boer secara optimis menyatakan kesepakatan UE ini menjadi pertanda itikad baik negara-negara maju untuk mencapai target reduksi emisi global di tahun 2020 dengan memperbaiki ekonomi menjadi lebih hijau.

Sebelumnya, pertemuan Poznan selalu dibayang-bayangi mundurnya komitmen negara-negara maju untuk mengurangi emisi karbon mereka, terimbas krisis finansial yang kini melanda dunia. Sejak hari pertama konferensi Poznan, De Boer kerap mengulang-ulang pernyataan bahwa krisis finansial yang terjadi karena hancurnya sistem kredit perbankan, tidak dapat menjadi alasan untuk mengacuhkan isu global seperti perubahan iklim.

"Saat ekonomi dunia mulai membaik nanti, tak berarti perubahan iklim akan mereda pula,"kata De Boer.

Published in Jurnal Nasional, international page

2nd Article:

Jualan Hutan Indonesia Semakin Lancar

Upaya Indonesia "menjual" hutannya ke pasar karbon dunia semakin terbuka dengan dimasukkannya usulan-usulan nusantara ke dalam kesimpulan terakhir pertemuan perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Poznan, Polandia tentang pengurangan emisi karbon dioksida dari hutan.

Usulan tersebut antara lain mencakup perhitungan jumlah karbon yang terlepas akibat penggundulan hutan, kekeringan lahan serta diperhitungkannya peranan dan kontribusi pengelolaan hutan. Dengan demikian, usulan penjualan hutan yang dicantumkan dalam Reduction on Deforestation and Degradation (REDD) ini juga akan melibatkan transfer teknologi dan pembangunan kapasitas tenaga kerja untuk dapat melakukan pengawasan berlangsungnya program ini.

" Indonesia menegaskan pentingnya kerjasama dan tindakan nyata dalam REDD sebagai bagian mitigasi negara-negara berkembang, dengan bantuan transfer teknologi, keuangan dan pembangunan kapasitas,"kata Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar. Dari sana, negara-negara hutan hujan tropis seperti Indonesia akan mendapatkan bayaran dari pasar karbon, terhitung dari jumlah emisi yang dapat diserap hutan. Secara sederhana usulan ini akan membayar negara-negara pemilik hutan untuk tidak mengalihkannya sebagai pertanian atau industri.

Meski demikian, batu penghalang sempat terjadi saat negara-negara Arab dan aktivis lingkungan memertanyakan hak masyarakat lokal yang hidupnya tergantung pada hutan. Timbul kekhawatiran negara-negara pemilik hutan akan mengakali sistem ini dengan membabat hutan alami untuk menggantikannya sebagai hutan industri, namun tetap mendapatkan dana REDD. Akal-akalan ini dapat berarti mengusur komunitas lokal yang hidupnya bergantung pada hutan itu sendiri. Di Poznan perwakilan sekitar 10 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menemui Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar untuk mengajukan kekhawatiran ini. Dilain pihak, di meja negosiasi internasional, isu komunitas lokal justru menjadi senjata bagi negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi untuk menentang upaya mitigasi atau pencegahan perubahan iklim, yang dapat berujung berkurangnya konsumsi minyak dunia.

Delegasi Indonesia untuk negosiasi hutan Nur Masripatin menyatakan pengertian hutan yang akan dimasukkan dalam REDD ini memang akan dikembalikan pada negara masing-masing. Begitu pula dengan nasib komunitas lokal yang hidupnya bergantung pada hutan.

"Semuanya dikembalikan pada negara pemilik hutan sendiri, karena isu tersebut terkait kedaulatan negara," kata Nur, sambil mengacu pada Undang-undang 45, yang memasukkan hutan sebagai kekayaan alam milik negara. Hak-hak komunitas lokal juga akan diberlakukan menurut peraturan Departemen Kehutanan.

Published in Jurnal Nasional, international page